



Hamengku Buwono X
Gubernur DIY

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019**



Paku Alam X
Wakil Gubernur DIY

Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara-saudara warga masyarakat DIY yang saya hormati dan cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah Subhanahu Wata'ala* atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah DIY Tahun 2019.

Penyusunan dan penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab kami sebagai Gubernur kepada masyarakat DIY. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini juga merupakan tanggung jawab pelaksanaan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY bahwa Kepala Daerah wajib menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan DIY sangat terkait dengan visi-misi Pemerintah Daerah DIY. Visi Pembangunan DIY sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022, yaitu: **“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”**.

Kemuliaan martabat manusia Jogja dalam visi Gubernur DIY digambarkan dalam **“Lima Kemuliaan”** atau **“Panca Mulia”** yakni:

1. terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing
2. terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan

3. terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan
4. terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sehingga *Panca Mulia* dari Visi Gubernur DIY dapat diejawantahkan dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017-2022 sebagai berikut:

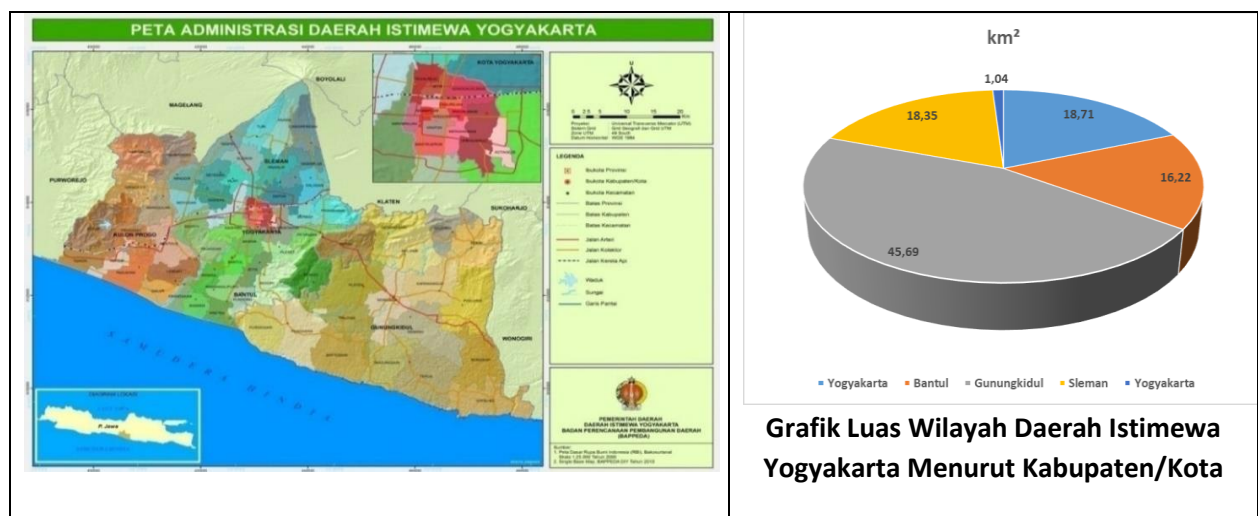
- 1) ***Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban***
- 2) ***Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Demokratis***

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2019 merupakan laporan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selama tahun 2019 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada umumnya telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

A. GAMBARAN UMUM:

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara 7^o.33'-8^o.12' Lintang Selatan dan 110^o.00'-110^o.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.133,15 km² atau 0,16% dari luas Indonesia (1.916.906,77 km²). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan luas wilayah terkecil setelah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari:

1. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,28 km² (18,71%)
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 508,13 km² (16,22%)
3. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.431,42 km² (45,69%)
4. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,35%)
5. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,04%)

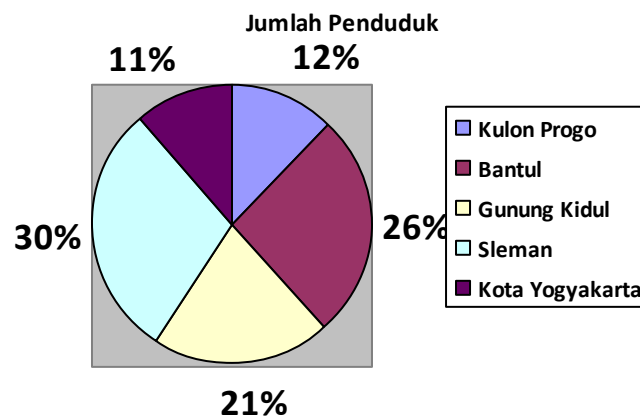


Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa
2. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa
3. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/desa
4. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa
5. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 berdasarkan data kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Semester II tahun 2019 adalah sebanyak 3.656.108 orang. Persebaran penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut kabupaten/kota tahun 2019 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sejumlah 1.075.575 orang (29,42%) diikuti oleh Kabupaten Bantul sejumlah 949.325 orang (25,97%), Kabupaten Gunungkidul sejumlah 769.907 orang (21,06%), Kabupaten Kulon Progo sejumlah 447.246 orang (12,23%) dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sejumlah 414.055 orang (11,33%).

**Grafik Persebaran Jumlah Penduduk
Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota (%)**



Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2019.

B. KONDISI EKONOMI

1. Sektor Unggulan

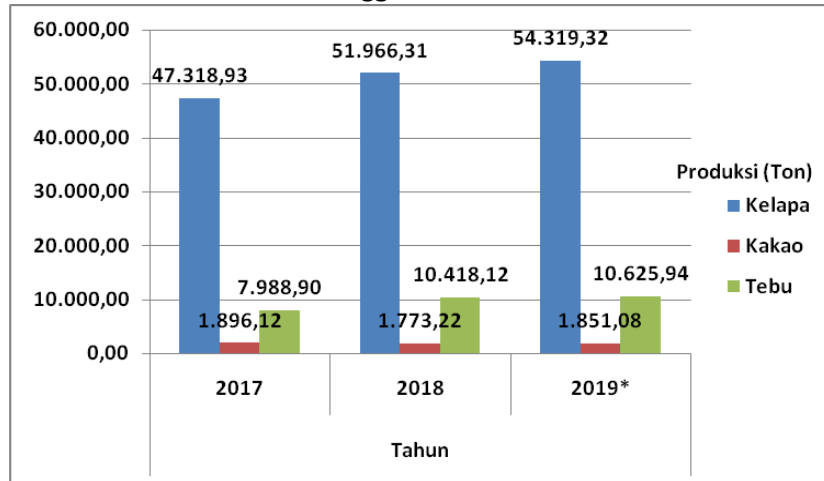
a) Sektor Pertanian dan Perikanan

**Tabel Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan DIY
Tahun 2018-2019**

No	Komoditas	Luas Panen (ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ton)	
		2018	2019*	2018	2019*	2018	2019*
1.	Padi	92.035	142.467	54,07	59,00	497.599	840.667
2	Jagung	61.356	66.008	50,40	52,00	299.084	344.539
3	Kedelai	8.703	5.238	12,25	12,00	18.822	6.343

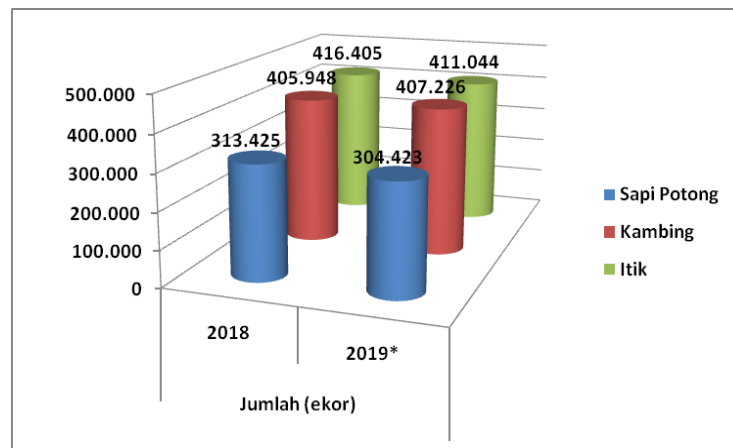
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019

Tabel Produksi 3 Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2017-2019



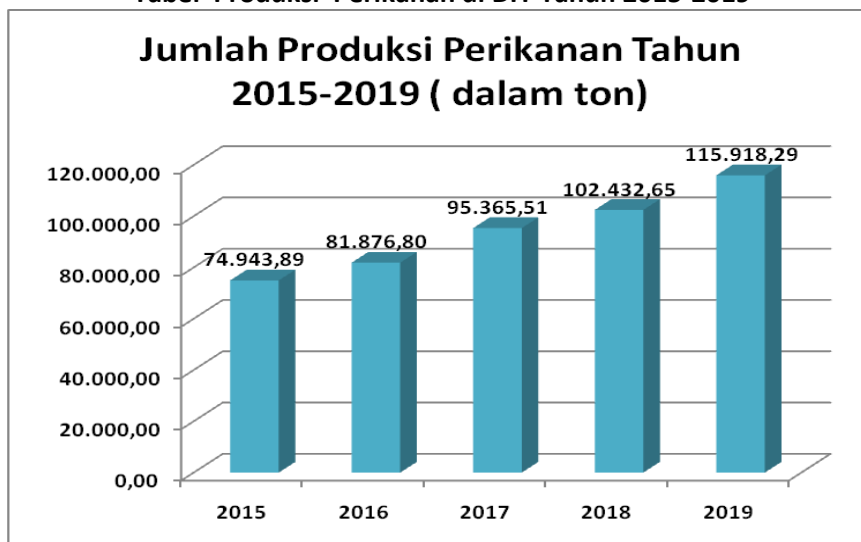
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019 (diolah)

Tabel Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2018-2019



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019 (Diolah)

Tabel Produksi Perikanan di DIY Tahun 2015-2019



b) Sektor Industri Pengolahan

Tabel Perkembangan IKM di DIY Tahun 2017-2019

IKM	2015	2016	2017	2018	2019
Unit usaha (UU)	88.637	90.906	91.214	94.840	97.013
Tenaga kerja (orang)	326.669	333.980	330.508	351.425	360.242
Nilai investasi (RpJuta)	1.187.754	1.269.897	1.208.564	1.949.721	2.084.560
Nilai produksi (RpJuta)	3.489.769	3.643.222	12.463.258	12.749.271	13.041.848
Nilai bahan baku dan penolong (RpJuta)	1.550.832	1.593.631	8.620.133	7.335.020	7.537.467

Sumber: Disperindag DIY, 2019

Jumlah IKM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rerata pertumbuhan sebesar 2,29%. Pada tahun 2019 jumlah IKM meningkat sebesar 2,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah unit usaha tersebut diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 2,51% dari sebesar 351.425 orang pada tahun 2018 menjadi 360.242 orang pada tahun 2019. Peningkatan nilai produksi pada tahun 2019 adalah sebesar 2,29% dibandingkan dengan tahun 2018 atau dari sebesar Rp. 12.749.270.000 pada tahun 2018 menjadi Rp. 13.041.848 pada tahun 2019.

c) Sektor Pariwisata

Tabel Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal/LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus			Wisman	Wisnus
2015	308.485	3.813.720	4.122.205	11.337	2,07	1,85
2016	355.313	4.194.261	4.549.574	14.069	2,00	1,95
2017	397.951	4.831.347	5.229.298	16.135	2,13	1,98
2018	416.374	5.272.719	5.689.093	17.814	2,15	1,99
2019	433.027	6.116.354	6.549.381	19.370	2,31	1,99

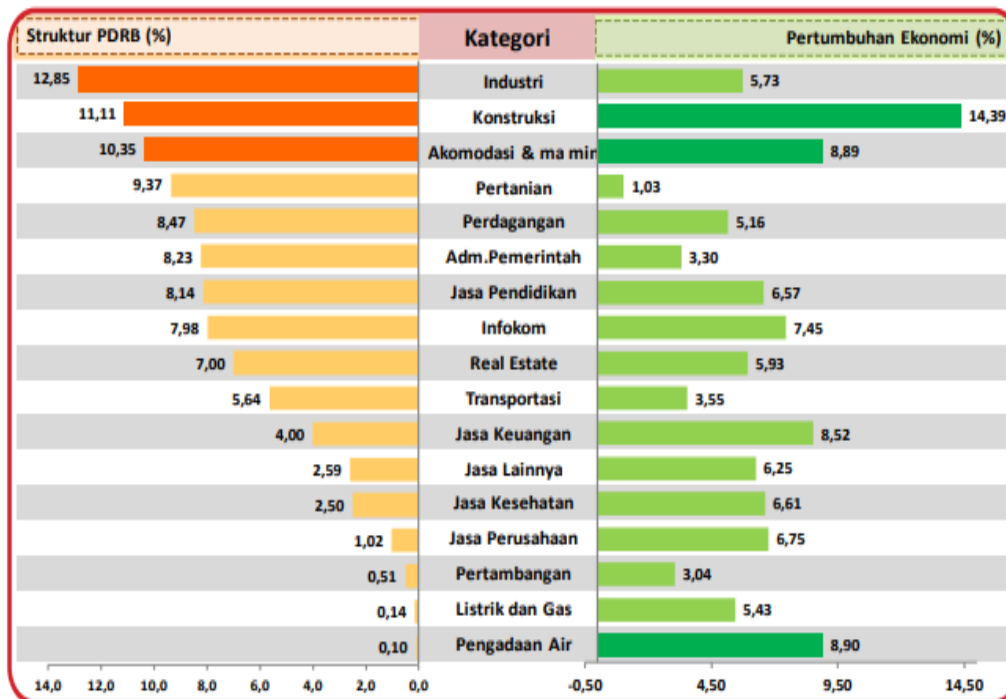
Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2019

Pada tahun 2019 jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi di DIY sebanyak 6.549.381 orang terdiri dari jumlah wisatawan mancanegara 433.027 wisatawan (6,61%) dan jumlah wisatawan domestik sebanyak 6.116.354 wisatawan (93,39%), atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,14% (860.288 orang). Mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi pada tahun 2018 (8,8%).

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menempati peringkat ketiga dalam pembentukan struktur PDRB DIY tahun 2019, yaitu sebesar 10,35%. Sementara itu laju pertumbuhan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2019 adalah sebesar 8,89%. Pertumbuhan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum diantaranya didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan dan banyaknya kegiatan di DIY sepanjang tahun 2019, termasuk kegiatan Meeting, Incentive, Conference, Exhibition (MICE).

2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Gambar Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi DIY tahun 2019



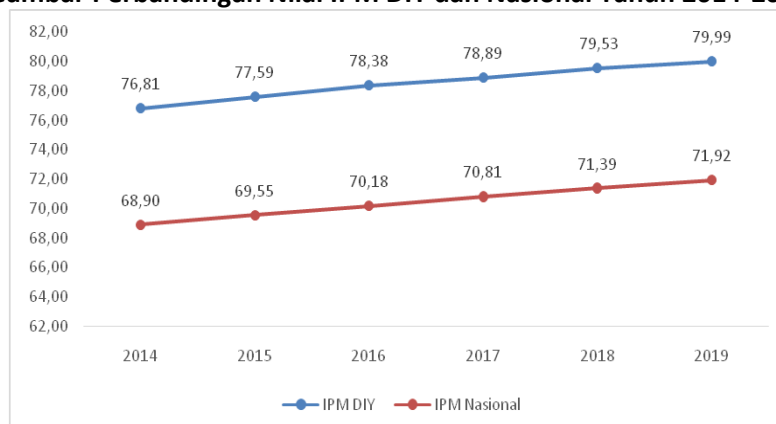
Sumber: Laporan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2019 (BPS DIY)

C. INDIKATOR KINERJA MAKRO

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Sesuai dengan ketentuan nasional, variabel IPM diukur dengan beberapa indikator, yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, dan daya beli yang diukur dengan daya beli masyarakat yang merupakan pengeluaran riil masyarakat, atau *Purchasing Power Parity* (PPP).

Gambar Perbandingan Nilai IPM DIY dan Nasional Tahun 2014-2019



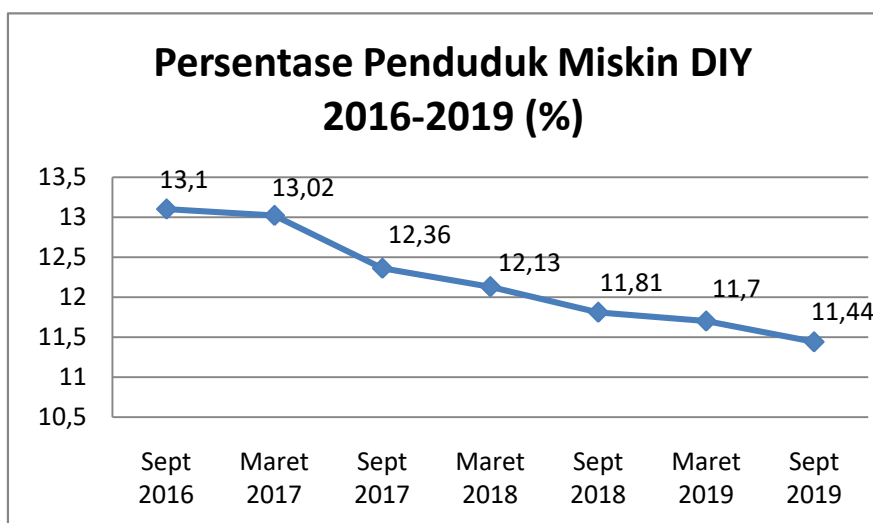
Sumber: BPPSD DIY, 2019 (data diolah)

Tabel Indeks Pembangunan Manusia DIY dan Variabel Pembentuk Tahun 2017 – 2019

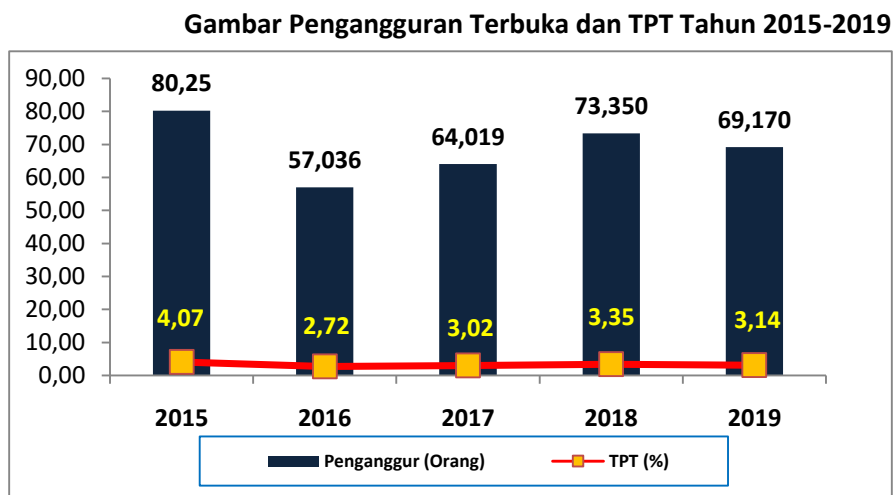
No.	Variabel IPM	Satuan	2017	2018	2019
1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,74	74,82	74,92
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,42	15,56	15,58
3.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,19	9,32	9,38
4.	Pengeluaran per kapita	Rp 000	13.521	13.946	14.394
	IPM		78,89	79,53	79,99

Sumber : BPS, 2019

2. Angka Kemiskinan

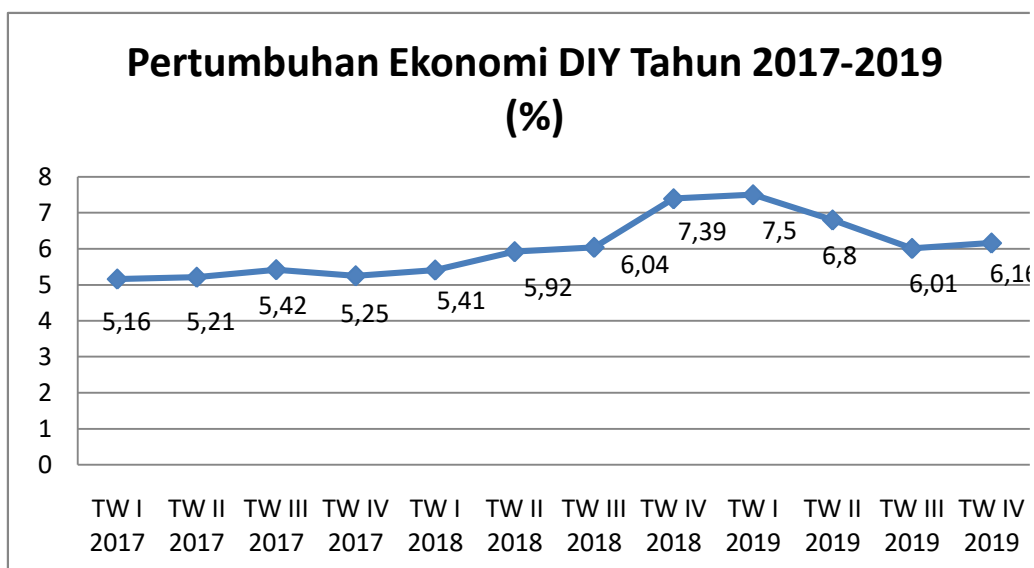


3. Angka Pengangguran



Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2015 -2019 (Agustus)

4. Pertumbuhan Ekonomi



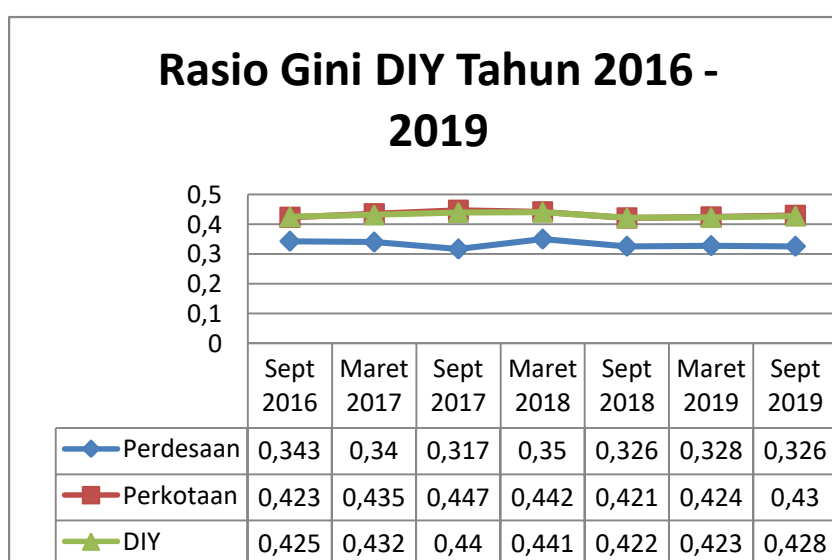
5. Pendapatan Per Kapita

Tabel PDRB per kapita DIY Tahun 2017 – 2019

	Satuan	2017	2018	2019
PDRB	Rp 000	92.300.243.900	98.024.264.300	104.489.706.370
Jumlah penduduk	Jiwa	3.762.167	3.802.872	3.842.932
PDRB per kapita	Rp 000	24.533,80	25.776,38	27.190,10

Sumber : BPS, 2019

6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)



Sumber : BPS, 2019

7. Penurunan Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah

Gambar Perkembangan Indeks Williamson DIY Tahun 2014-2019



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

D. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Urusan Pendidikan

Dalam rangka pencapaian pendidikan berkualitas, ada beberapa data yang dapat memberikan gambaran pendidikan di DIY, antara lain angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka kelulusan.

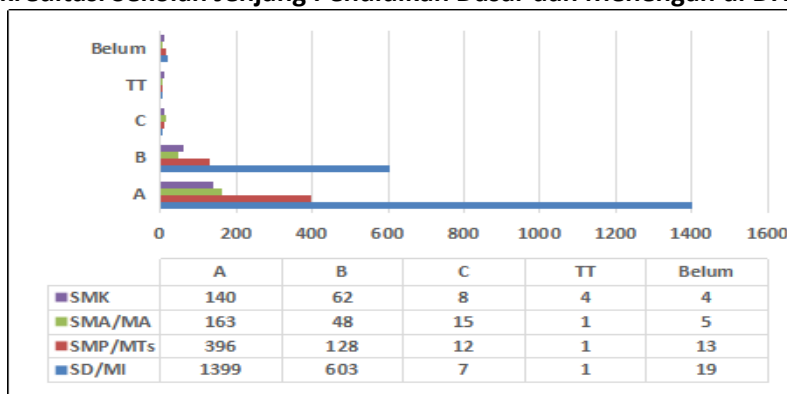
Tabel Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, dan Angka Kelulusan Tahun 2017-2019

No	Satuan Pendidikan	Angka Mengulang (%)			Angka Putus Sekolah (%)			Angka Kelulusan (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	SD/MI	1,15	1,11	0,71	0,02	0,02	0,01	100	100	100
2	SMP/MTs	0,15	0,14	0,14	0,05	0,05	0,04	99,95	99,96	99,96
3	SMA/MA/SMK	0,14	0,10	0,09	0,12	0,11	0,10	99,92	99,94	99,94

Sumber: Disdikpora DIY, 2019

Sesuai dengan tabel tersebut, angka mengulang dan angka putus sekolah mengalami tren penurunan sedangkan angka kelulusan mengalami kecenderungan peningkatan dari tahun 2017-2019. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pendidikan di DIY yang tentunya didukung dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat DIY.

Tabel Status Akreditasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di DIY Tahun 2019



Sumber: BAN Provinsi DIY, 2019

Berdasarkan data tersebut, atatus akreditasi 'A' masih mendominasi jenjang pendidikan dasar dan menengah di DIY, meski demikian masih ada sekolah/ madrasah yang memperoleh status 'C' dan 'TT'. Hal ini tentunya merupakan tantangan bagi peningkatan kualitas satuan pendidikan di DIY melalui perbaikan sarana prasarana, proses belajar mengajar, dan peningkatan mutu PTK.

2. Urusan Kesehatan

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2019

No	Indikator Kerja	Satuan	2019			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	67,18	74,80	109	74,80	100
3	Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa	%	60	77,9	127	75	103,8
4	Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan	%	74,8	74,8	100	81,3	92

Dari tabel tersebut diketahui bahwa Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga tercapai 100%. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu diukur dengan Persentase Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi pada tahun 2019 yang ditargetkan sebesar 67,18% telah terealisasikan sebesar 74,80% dengan realisasi capaian sebesar 109%. Faktor pendorong keberhasilan capaian target Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi pada tahun 2019 adalah:

1. Regulasi Permenkes nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi Puskesmas, klinik pratama, dokter/dokter gigi praktek mandiri, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 34 tahun 2017 tentang akreditasi rumah sakit yang mewajibkan akreditasi di rumah sakit.
2. Adanya pembinaan mutu, pelayanan, SDM dan peningkatan kapasitas SDM untuk faskes (FKTP dan FKTL)
3. Adanya pendamping akreditasi dan mutu FKTP

Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu diukur dengan persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa pada tahun 2019 yang ditargetkan sebesar 60% telah terealisasi sebesar 77,9 % dengan realisasi capaian sebesar 127%. Sedangkan Terwujudnya pelayanan kesehatan paru yang bermutu diukur dengan persentase pemenuhan standar mutu pelayanan pada tahun 2019 yang ditargetkan sebesar 74,8% telah terealisasi sebesar 74,8 % dengan realisasi capaian sebesar 100%.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Peningkatan aksesibilitas di wilayah di D.I Yogyakarta didukung oleh pembangunan jalan jalur Pantai Selatan (Pansela) yang membentang di sepanjang pantai selatan Yogyakarta dari Congot (Kabupaten Kulon Progo) melintasi Parangtritis (Kabupaten Bantul) sampai dengan Duwet (Kabupaten Gunungkidul) yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemda DIY (APBD) untuk penyediaan lahan dan Kementerian PUPR untuk pembangunan fisik (APBN), dan pembangunan jalan Prambanan (Sleman) – Gading (Gunungkidul). Sampai dengan akhir tahun 2019, telah terbangun jalan baru sepanjang 13,5KM (Jalur Jalan Lintas Selatan 7,5 KM dan Jalan Prambanan – Gading 6 KM), sehingga telah terbangun 971,81 KM jalan dari 996,16 KM jalan yang direncanakan atau setara dengan 97,56%. Capaian tersebut telah melampaui target aksesibilitas jalan pada RPJMD 2017 – 2022 sebesar 101,88% dari target sebesar 95,76%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 telah mencapai 97,56%.

Berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan (100%), pada akhir tahun 2019 diketahui jalan dalam kondisi mantap sepanjang km 558,80km atau 73,48%. Kondisi jalan mantap tersebut telah melampaui target yang dicapai melalui program Penyelenggaraan Jalan. Kondisi Jalan Provinsi hingga akhir tahun 2019 disajikan dalam tabel

Tabel Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2019

No.	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		km	%		km	%
1	Mantap	558,80	73,48	Baik	369,255	48,56
				Sedang	189,545	24,93
2	Tidak Mantap	201,65	26,52	Rusak Ringan	139,300	18,32
				Rusak Berat	62,350	8,25
JUMLAH		760,45	100,00	Jumlah	760,45	100,00

Sumber: Dinas PUP & ESDM, 2019

Melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta dukungan dari APBN Ditjend Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui kegiatan pembangunan SPAM Regional, SPAM IKK, Optimalisasi SPAM IKK dan swadaya masyarakat, hingga tahun 2019 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 91,30% dari jumlah penduduk DIY atau setara dengan 3.338.026 jiwa. Sampai dengan akhir tahun 2019 capaian penduduk berakses air minum telah mencapai 102,92% dari target sebesar 88,71% dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017 - 2022 telah tercapai sebesar 96,98%. Sebagai wujud keterpaduan program penyediaan air minum layak, melalui dana APBN, dilakukan Pembangunan jaringan perpipaan SPAM IKK di 3 lokasi, yaitu 1) SPAM IKK Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul (cakupan layanan 200 KK), 2) SPAM IKK Salamrejo, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo (cakupan layanan 400 KK), dan 3) SPAM IKK

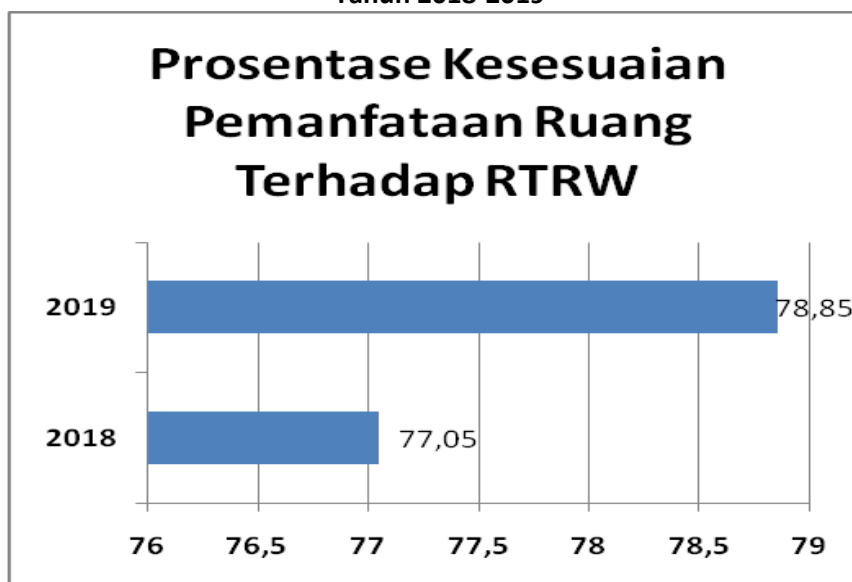
Kalibawang, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo (cakupan layanan 500 KK). Adapun untuk penambahan ketersediaan air baku, atas dukungan APBN melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) telah dibangun Bendung Kamijoro, yang mampu menyediakan air baku sebesar 500 liter/detik.

Melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi sebagai upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY dan melalui dukungan APBN dan APBD Kabupaten, jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak sejumlah 3.532.531 jiwa atau setara dengan 96,62% dari jumlah penduduk DIY sejumlah 3.656.108 Jiwa (Dataku, 2019). Sampai dengan akhir tahun 2019 persentase capaian penduduk berakses sanitasi telah mencapai 105,51% dari target sebesar 91,58%. Pada tahun 2019 terdapat penambahan jumlah IPAL Komunal berupa Pembangunan infrastruktur air limbah system setempat padat karya (stunting) sejumlah 10 titik di kabupaten Kulon Progo dan 10 titik di Kabupaten Bantul, dengan cakupan 1.266 KK, sehingga sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah IPAL Komunal yang telah terbangun sebanyak 424

4. Urusan Penataan Ruang

Berdasarkan Permen ATR No. 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Permen ATR No. 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Audit Tata Ruang maka capaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2019 diperoleh dari hasil perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan perbandingan antara peta pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting.

Gambar Capaian Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Tahun 2018-2019



Sumber: DPTR DIY, 2019 (Diolah)

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2018 sebesar 77,05%, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 78,85% atau melebihi target tahun 2019 yaitu 78,5% sehingga persentase realisasi tahun 2019 adalah 101,09%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 82,5% maka capaian tahun 2019 sebesar 95,58%. Realisasi capaian kinerja tersebut di dukung dengan jumlah

Satuan Ruang Strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana rinci, rencana induk dan RTBL sebesar 13,06%, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan 9,58% dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis sebesar 8,89%. Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan pada satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana rinci, rencana induk dan RTBL peningkatan 3,89%, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan peningkatan 2,77%, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis peningkatan 3,33%.

Persentase penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan adalah sebesar 31,53% dari target yang ditetapkan sebesar 30,42% atau setara 103,65%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini mencapai 57,92% dari target kinerja akhir RPJMD sebesar 54,44%. Indikator ini diukur dari jumlah persentase capaian satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa rencana rinci, rencana induk, dan RTBL, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis.

5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak didukung oleh Program Penyelenggaraan Perumahan dan Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun 2019 dengan jumlah 10.555 unit melalui berbagai sumber pendanaan yaitu anggaran DAK, BSPS, APBD kabupaten/kota, dan APBD Provinsi. Pada tahun 2019 target hunian yang layak adalah 95,49%. Dengan demikian Penanganan RTLH mulai Tahun 2017-2019 berjumlah 25.486 unit, dapat memenuhi target persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak pada tahun 2019 yaitu 96,66 %.

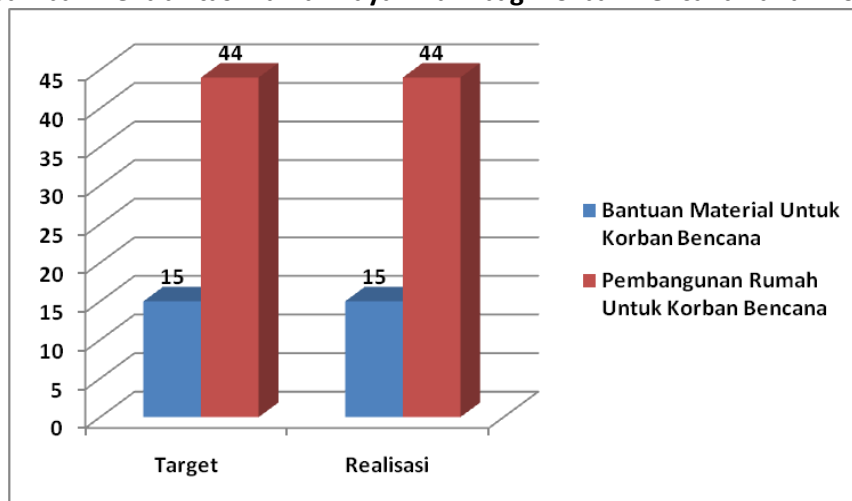
Tabel 0-1 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019

LOKASI	DATABASE KAB	TER TANGANI TH 2017	TER TANGANI TH 2018	PENANGANAN RTLH 2019					SDH TER TANGANI TH 2019
				DAK	BSPS	KAB/ KOTA	CSR	PROP	
Kota Yogyakarta	2.797	227	488	178	150	208	0	16	552
Kab. Kulon Progo	14.891	2.106	2.005	162	748	350	0	1.140	2.400
Kab. Bantul	5.703	2.101	1.848	178	1.515	133	0	535	2.361
Kab. Sleman	16.347	1.863	1.447	170	600	600	0	760	2.130
Kab. Gunungkidul	25.840	912	1.934	0	1.137	134	0	1.841	3.112
JUMLAH	65.578	7.209	7.722	688	4.150	1.425	0	4.292	10.555

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2019

Pelaksanaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana berdasarkan realisasi yang sudah dilaksanakan oleh BPBD DIY dengan perincian sebagai berikut.

Gambar Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Tahun 2019



6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah desa/kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan tercapai sebesar 104,38%, yaitu dari 320 desa/kelurahan yang ditargetkan, dan yang sudah terealisasi sebesar 334 desa/kelurahan. Jenis upaya warga menjaga keamanan lingkungan yaitu:

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Kamling se-Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 392 Pos yang terbagi dalam 4 Kabupaten dan 1 Kota yang masing-masing terdiri dari Kabupaten Kulon Progo berjumlah 69 Pos, Kabupaten Bantul berjumlah 69 Pos, Kabupaten Gunungkidul berjumlah 132 Pos, Kabupaten Sleman berjumlah 83 Pos dan Kota Yogyakarta berjumlah 39 Pos
2. Pembentukan Regu Keamanan se-Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 347 regu yang terbagi dalam 4 Kabupaten dan 1 Kota yang masing-masing terdiri dari Kabupaten Kulon Progo berjumlah 56 regu, Kabupaten Bantul berjumlah 60 regu, Kabupaten Gunungkidul berjumlah 113 regu, Kabupaten Sleman berjumlah 81 regu dan Kota Yogyakarta berjumlah 37 regu
3. Penambahan Jumlah Anggota Hansip/Linmas se-Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 222 Anggota yang terbagi dalam 4 Kabupaten dan 1 Kota yang masing-masing terdiri dari Kabupaten Kulon Progo berjumlah 28 anggota, Kabupaten Bantul berjumlah 47 anggota, Kabupaten Gunungkidul berjumlah 61 anggota, Kabupaten Sleman berjumlah 64 anggota dan Kota Yogyakarta berjumlah 22 anggota
4. Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam se-Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 376 tamu yang terbagi dalam 4 Kabupaten dan 1 Kota yang masing-masing terdiri dari Kabupaten Kulon Progo berjumlah 69 tamu, Kabupaten Bantul berjumlah 71 tamu, Kabupaten Gunungkidul berjumlah 111 tamu, Kabupaten Sleman berjumlah 81 tamu dan Kota Yogyakarta berjumlah 44 tamu

Kejadian bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 yang paling banyak terjadi adalah tanah longsor, kebakaran permukiman, dan angin kencang. Kebakaran permukiman paling banyak terjadi di Kabupaten Bantul dengan persentase 41,51% dari seluruh jumlah kejadian kebakaran permukiman di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sejumlah 225 dari 542 jumlah kejadian. Untuk kejadian longsor tahun 2019, Kabupaten Bantul juga menempati posisi tertinggi dengan 220 kejadian atau 43,48% dari total 506 kejadian tanah longsor di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan

kejadian angin kencang di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun 2019 cenderung merata dengan peringkat tertinggi di Kabupaten Sleman dengan 85 kejadian atau 50,59% dari total 168 kejadian yang termasuk kategori bencana.

Langkah-langkah prioritas BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meminimalisir risiko dengan meningkatkan ketahanan daerah adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana melalui Destana/Katana dan Sekolah Siaga Bencana (SSB)/ Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
2. Penguatan sistem peringatan dini baik yang berbasis masyarakat maupun teknologi pada wilayah rawan bencana melalui pembangunan dan pengembangan EWS/ Sistem Peringatan Dini terintegrasi
3. Penguatan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan melalui pengembangan pemanfaatan TI
4. Menyusun kajian-kajian kebencanaan untuk pengurangan risiko
5. Memberdayakan forum/jaringan/kemitraan antar-lembaga untuk pengurangan risiko bencana terutama melalui FPRB dan klaster-klaster PB
6. Pemulihan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dan aman (*build back better and safer*) berbasis pengurangan risiko bencana

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya tersebut menjadi kinerja utama atau indikator sasaran BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu indeks ketahanan daerah. Faktor-faktor utama yang menjadi penentu dalam peningkatan indeks ketahanan daerah adalah komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Faktor-faktor tersebut menjadi target dari kinerja program/kegiatan atau pelayanan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Urusan Sosial

Penyelenggaraan Urusan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2019, digambarkan melalui indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai berikut:

1. PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 40,97% dengan realisasi sebesar 42,17% dengan persentase capaian target 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 sebesar 95,24%
2. Indikator Persentase PPKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial: Target 2019 sebesar 51,57% dengan realisasi sebesar 51,72%. Capaian target 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 sebesar 100,08%.

8. Urusan Tenaga Kerja

Capaian realisasi indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan pada tahun 2019 ini sangat baik yaitu sebesar 106,19%. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan pada tahun 2019 ditargetkan mencapai 1050 orang dengan realisasi hingga 2019 sebesar 1115 orang. Apabila capaian 2019 dibandingkan target akhir tahun pada RPJMD yaitu tahun 2022 maka capaiannya sebesar

42.47%. Indikator ini bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3.33% (capaian tahun 2018 sebesar 102.86%). Capaian hingga tahun 2019 sebanyak 1115 orang dengan rincian penempatan pada tahun 2018 sebanyak 539 orang bertambah 576 penempatan pada tahun 2019. Keberhasilan untuk mewujudkan indikator ini adalah pelaksanaan pelatihan yang telah memenuhi standar kompetensi serta memanfaatkan Kios 3 in1 untuk penempatan lulusan pelatihan.

Capaian realisasi indikator pada sasaran terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja yaitu Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial pada tahun 2019 ini sebesar 110,00% sehingga sangat baik. Indikator ini dibandingkan dengan capaian tahun 2018 mengalami peningkatan 10 % (capaian tahun 2018 100%). Berdasarkan dokumen RPJMD TA 2017-2022, indikator Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 20 kasus dan terealisasi sebesar 22 kasus sehingga capaian realisasinya sebesar 110,00%. Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh peran mediator hubungan industrial untuk menyelesaikan semua kasus yang didaftarkan serta keberhasilan Tim Deteksi Dini dalam mendampingi perusahaan menjalankan hubungan industrial dengan baik.

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran Strategis urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Untuk mencapai sasaran ini, maka diperlukan adanya strategi-strategi dan arah kebijakan yang terarah. strategi yang dilakukan antara lain dengan:

- a. Meningkatkan partisipasi perempuan di ranah public melalui advokasi dan penguatan kapasitas dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilih perempuan.
- b. Menurunkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.
- c. Meningkatkan level capaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui peningkatan kapasitas gugus tugas KLA di provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan korban melalui lembaga layanan yang ada seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TP2AKK)

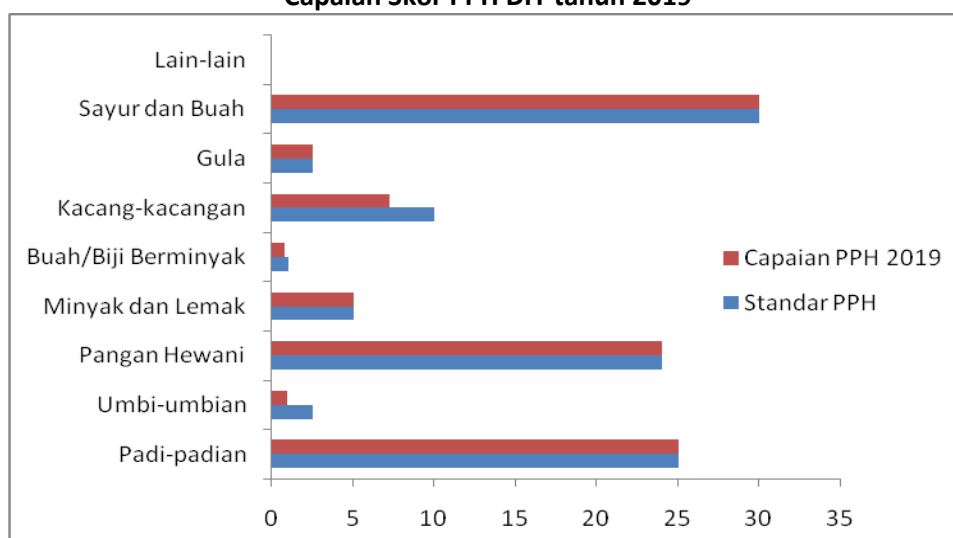
Adapun upaya-upaya yang dilakukan diantaranya :

1. Adanya Pelayanan Kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui jejaring dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK)
2. Adanya Pusat Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota
3. Adanya Telepon Sahabat Anak (TeSa 129) yang dikembangkan menjadi Telepon Sahabat Anak dan Keluarga (TeSaGa)
4. Dilaksanakannya Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak
5. Banyaknya lembaga yang menangani (Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan)
6. Adanya Sistem kerja berjenjang yang sudah berjalan sangat baik (Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan)
7. Payung hukum cukup lengkap (Perda No 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan).

10. Urusan Pangan

Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2019 sebesar 95,50. Capaian dihitung menggunakan data dari tabel konsumsi hasil SUSENAS BPS tahun 2018 dengan menggunakan aplikasi penghitungan Skor PPH yang disediakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Realisasi pada tahun 2019 ini mencapai 105,85% dibanding target tahunan. Ketercapaian dibanding target akhir RPJMD DIY tahun 2022 sebesar 91,12 telah tercapai sebesar 104,81%. Hasil ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 89,92. Capaian ini sudah melebihi capaian Nasional sebesar 91,3. Namun masih perlu peningkatan pola konsumsi masyarakat di beberapa golongan pangan yakni umbi-umbian, buah/biji berminyak dan kacang-kacangan karena capaiannya masih di bawah standar yang dianjurkan.

Gambar Grafik Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Standar dan Capaian Skor PPH DIY tahun 2019



Sumber: Data BPS diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019

Tercapainya indikator skor PPH ini disebabkan pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang didorong oleh perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya B2SA terus digalakkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, salah satunya melalui usaha pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Lahan pekarangan rumah tangga dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga sehingga pola konsumsi B2SA dapat tercapai. Skor PPH yang semakin tinggi menunjukkan kualitas konsumsi yang semakin baik dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

11. Urusan Pertanahan

Kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pertanahan antara lain Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten serta Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang keduanya bermuara pada adanya kepastian hukum bagi status Tanah Kasultanan dan Kadipaten di DIY. Disamping juga dibangun sistem informasi pertanahan yang akan menunjang tertibnya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten pada masa yang akan datang. Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perda 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen;

(c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan dan Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Pada saat ini Tanah Kasultanan dan Kadipaten banyak dimanfaatkan dan digunakan baik oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat, tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Dalam kaitan ini maka pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Upaya untuk mengadministrasi keberadaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten dilakukan melalui proses pendaftaran agar diperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun instansi atau masyarakat yang menempati tanahnya.

Dalam menjalankan perannya, Pemda DIY melaksanakan Urusan Pertanahan untuk memfasilitasi:

1. Penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.
2. Memfasilitasi pembentukan regulasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Capaian Kinerja Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan untuk tahun 2019 telah melampaui target. Dari target 9.419 bidang yang sudah terealisasi adalah 10.729 bidang atau mencapai 113,91%. Perhitungan bahwa jumlah total bidang SG, PAG dan Tanah Desa yang telah didaftarkan agar memiliki kepastian hukum 10.729 bidang dari total jumlah bidang 13.877 bidang. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sifatnya berkelanjutan, sampai dengan tahun 2019 telah didaftarkan sebanyak 10.729 bidang dan telah terbit sebanyak 4.944 sertifikat. Persiapan pendaftaran tanah pada tahun berikutnya sudah dilakukan pemberkasan sebanyak 1.600 bidang.

12. Urusan Lingkungan Hidup

Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup, yaitu persentase ketercapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terhadap target akhir tahun RPJMD. Pada tahun 2019 persentase ketercapaian IKLH adalah 92,29%, melebihi target yang ditetapkan (88,56%). Angka capaian 92,29 %diperoleh dari perbandingan capaian IKLH tahun 2019 dengan target akhir RPJMD 2022. Capaian IKLH 2019 sebesar 61,05 angka indeks sedangkan target IKLH pada akhir RPJMD sebesar 66,15 angka indeks. IKLH merupakan formulasi dari 30% IKA, 30% IKU dan 40% IKTL. Rincian realisasi IKA, IKU, IKTL dan IKLH dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi IKA, IKU, IKTL dan IKLH 2018-2019

Indikator Sasaran	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKA	34,20	40,25	36,49	38,65
IKU	87,06	84,24	87,73	85,25
IKTL	55,50	60,86	58,18	59,70
IKLH	58,58	61,69	60,51	61,05

Sumber : BLH DIY, 2019 (diolah)

13. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk wajib KTP di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Desember 2019 berdasarkan *database* Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di kabupaten/kota adalah 2.790.485 orang. Dari jumlah tersebut, 99.69% atau sebanyak 2.781.908 telah melakukan perekaman biometrik dan tercatat di *database* KTP-el. Bila dipilah per kabupaten/ kota, Kabupaten Gunungkidul menempati posisi tertinggi dalam angka perekaman biometrik dan kepemilikan KTP-el, yaitu 99,96%, diikuti Kabupaten Bantul 99.83%, Kabupaten Sleman 99.68%, Kota Yogyakarta 99.66% terendah Kabupaten Kulon Progo 98,98%.

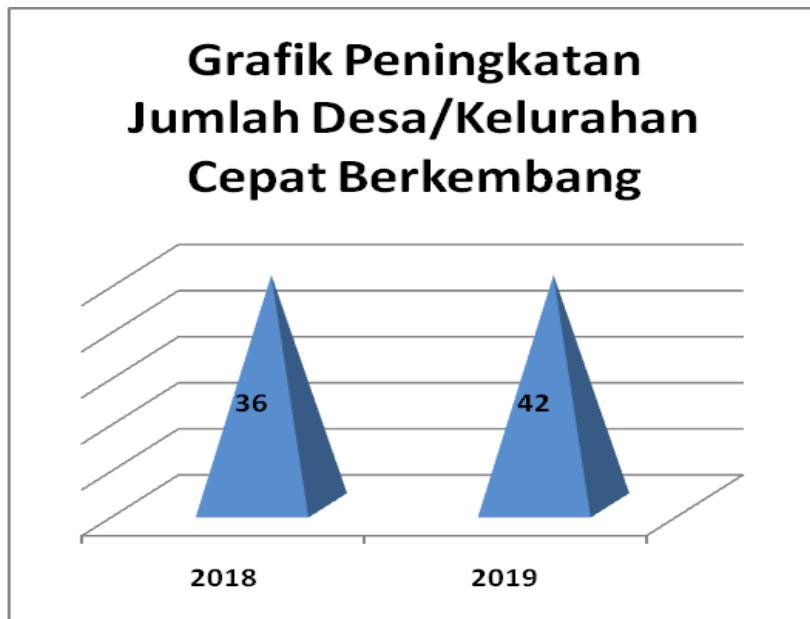
Walaupun angka perekaman dan kepemilikan KTP-el di Daerah Istimewa Yogyakarta telah melampaui target RPJMD, masih ada penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman biometrik sebanyak 8.577 orang atau 0.31% dari total wajib KTP. Penduduk yang belum melakukan perekaman karena alasan tinggal sementara di luar Daerah Istimewa Yogyakarta, bekerja di luar negeri, dan/atau telah pindah domisili tetapi belum melapor ke Dinas Dukcapil.

Pencapaian Daerah Istimewa Yogyakarta atas kepemilikan akta kelahiran anak sampai akhir 2019 tercatat 94.76%. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran, antara lain konversi *database* kelahiran non-SIAK ke *database* SIAK; kerja sama dengan puskesmas, bidan, dan rumah sakit dalam rangka percepatan penerbitan akta kelahiran; mewajibkan penduduk datang untuk melampirkan akta kelahiran; membebaskan sanksi denda keterlambatan pengurusan akta kelahiran bagi penduduk dari keluarga miskin; dan pendataan penduduk secara berkala.

14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dari hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 diketahui bahwa Desa dengan status Mandiri sebanyak 49 (empat puluh sembilan) desa, status Maju sebanyak 204 (dua ratus empat) desa dan status berkembang sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) desa (sumber data : agregat dari Kabupaten/Kota dan dapat diakses melalui web <http://IDM.kemendes.go.id>). Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil mengentaskan desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal meningkat menjadi desa Berkembang.

Sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemda DIY adalah dengan meningkatkan pembinaan Desa/Kelurahan melalui evaluasi perkembangan desa/kelurahan. Evaluasi ini merupakan suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrument evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan. Berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan, kondisi desa/kelurahan cepat berkembang sampai dengan tahun 2019 adalah 42 desa/kelurahan. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 6 desa/kelurahan dari tahun 2018 dan memenuhi target RPJMD tahun 2019 sebesar 100 persen.



Sumber : Biro Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, 2019 (Diolah)

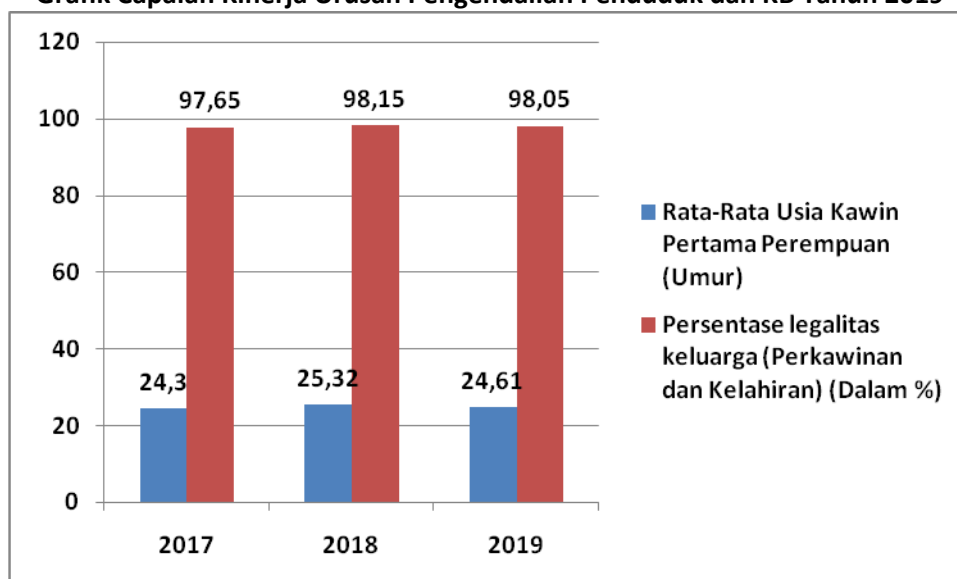
TP-PKK DIY merupakan salah satu lembaga yang menjadi penggerak tercapainya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TP-PKK DIY selama Tahun Anggaran 2019 adalah kegiatan :

1. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK)
2. Pencanaan Kesatuan Gerak PKK-Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK)-Kesehatan
3. Mengikuti Pelaksanaan Jambore Nasional Kader PKK
4. Lomba Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dalam Rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
5. Lomba Pengelola Terbaik PKK-KKBPK-Kesehatan Tingkat DIY
6. Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tingkat DIY
7. Pelatihan Penataan Arsip Tingkat DIY

15. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)

Sasaran Strategis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan dan meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia. Untuk sasaran pertama meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan menggunakan indikator umur menikah pertama perempuan sedangkan untuk sasaran kedua yaitu meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia menggunakan indikator Persentase Legalitas Keluarga (Perkawinan dan Kelahiran) pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2019



Sumber: DP3AP2 DIY, 2019 (diolah)

16. Urusan Perhubungan

Pada tahun 2019 capaian indikator program peningkatan tertib perizinan angkutan tidak dalam trayek telah mencapai 147% dari target 76%. Untuk mencapai indikator program penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian dihitung dengan cara menghitung jumlah tahapan yang dilaksanakan dibagi rencana keseluruhan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian kali 100%. Pada tahun 2019 capaian indikator program Penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian telah mencapai 50% dari target 40%.

Program pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas didukung dengan 2 (dua) indikator program, yakni (1) Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas pada kawasan prioritas, (2) Peningkatan pengendalian sistem simpang bersinyal di perkotaan Yogyakarta. Pada tahun 2019 capaian indikator program penerapan manajemen rekayasa lalu lintas pada kawasan prioritas telah mencapai 48% dari target 48%. Pada tahun 2019 capaian peningkatan pengendalian sistem simpang bersinyal di perkotaan Yogyakarta telah mencapai 53% dari target 60%.

Program pengembangan dan pengelolaan simpul transportasi dan perparkiran didukung dengan 2 (dua) indikator program, yakni (1) Jumlah penumpang yang terlayani, (2) Pengelolaan tempat khusus parkir. Untuk mencapai indikator program jumlah penumpang yang terlayani dihitung dengan cara menghitung jumlah total penumpang harian yang naik dan turun moda angkutan umum di terminal. Berdasarkan Renstra Dishub 2017-2022 target penumpang per hari adalah 4.550 orang, adapun realisasinya mencapai 7.260 penumpang per hari merupakan penjumlahan dari penumpang Terminal B Wates & Jombor (Data dari laporan kegiatan di Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran). Untuk mencapai indikator program pengelolaan tempat khusus parkir dihitung dengan cara menghitung kebutuhan daya tampung kendaraan di tempat khusus parkir. Pada tahun 2019 dari kewenangan pengelolaan perparkiran yang dimiliki yaitu Tempat Khusus Parkir Beskalan dan Bandara Adisucipto tercapai 109 Satuan Ruang Parkir (SRP) kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir dari target sebesar 69 SRP.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika mengintegrasikan 6 urusan ke dalam Sistem Informasi Eksekutif melalui *Integrated Development Management Center* (IDMC) (idmc.jogjaprov.go.id), yakni urusan Sosial, urusan Keamanan dan Ketertiban Umum, urusan Tata Ruang dan Pertanahan, urusan Kominfo, urusan Perhubungan dan urusan kependudukan. Melalui sistem informasi yang terintegrasi ini, akan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Didalam IDMC ini juga mengintegrasikan aplikasi layanan *e-Lapor* yang merupakan aplikasi pengaduan pelayanan publik dan informasi surveillance yang terkoneksi ke 26 titik CCTV yang ada di wilayah DIY. Untuk lebih memudahkan dalam komunikasi berjalan dengan baik dan lancar pada tahun 2019 dilakukan pengadaan 1 (satu) unit aplikasi server video konferensi dan 15 (lima belas) user aplikasi client video konferensi yang dapat digunakan secara bersamaan. Selain itu untuk lebih memperluas akses masyarakat terhadap informasi melalui penggunaan jaringan internet, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY menyediakan 76 titik WiFi gratis diantaranya di kawasan Malioboro sebanyak 21 titik dan di lokasi wisata tebing Breksi sebanyak 4 titik. Pada Tahun 2019 Pemda DIY memperoleh penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat.



Gambar: Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat pada Tahun 2019

18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu koperasi yang berbadan hukum provinsi maupun kabupaten/kota selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Koperasi Aktif	2.369	2.427	1.782	1.926	1.722
2	Koperasi tidak Aktif	316	311	598	63	196
3	Modal Sendiri (RpJuta)	1.318.800	1.139.942	1.200.158	1.425.918	1.625.568
4	Modal Luar (RpJuta)	2.320.866	1.835.173	2.085.166	2.262.263	2.512.343
5	Volume Usaha (RpJuta)	3.599.547	4.473.800	3.678.342	4.394.362	4.325.218
6	Koperasi Primer	2654	2707	2352	1963	1.890
7	Koperasi Sekunder	31	31	28	26	28

Sumber: Online Data System, Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2019

Salah satu upaya pembinaan UMKM adalah melalui kelompok (sentra) karena upaya ini lebih efektif dan efisien, disamping itu dengan sentra akan banyak melibatkan UMKM. Dengan pembinaan berbasis sentra ini akan meningkatkan jumlah UMKM secara signifikan, seperti data pada Tabel 3-74.

Tabel Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2015 - 2019

No	Skala Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1	Usaha Mikro	125.863	130.525	135.799	141.991	143.385
2	Usaha Kecil	57.412	59.655	62.042	64.896	65.533
3	Usaha Menengah	34.737	36.031	37.472	39.196	39.581
4	Usaha Besar	11.962	12.408	12.904	13.498	13.631
Jumlah		230.047	238.619	248.217	259.581	262.130

Sumber: Dataku Bappeda DIY tahun 2019

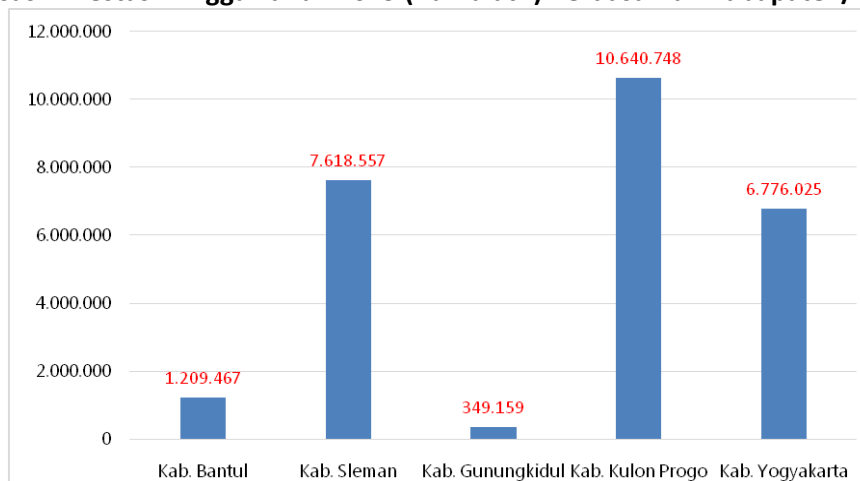
19. Urusan Penanaman Modal

Dari tabel dan grafik di bawah akan terlihat bahwa antara wilayah dengan nilai realisasi investasi tertinggi (Kabupaten Kulon Progo) dan terendah (Kabupaten Gunungkidul) masih terdapat kesenjangan cukup besar (sekitar Rp. 10.291.589.000.000). Hal ini menunjukkan masih belum terjadinya pemerataan pertumbuhan investasi di kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada grafik Perkembangan Investasi Per Kabupaten/Kota kumulatif sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 berikut:

**Tabel Nilai Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA dan PMDN
Hingga Tahun 2019 Berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp)**

No	Kab /Kota	Tambahkan Investasi		
		PMDN	PMA	PMDN + PMA
1	KAB. BANTUL	110.794.300.000	20.085.000.000	130.879.300.000
2	KAB. GUNUNGKIDUL	50.877.200.000	27.531.000.000	78.408.200.000
3	KAB. KULON PROGO	4.854.785.900.000	14.098.500.000	4.868.884.400.000
4	KAB. SLEMAN	795.214.800.000	107.178.000.000	902.392.800.000
5	KOTA YOGYAKARTA	487.166.500.000	50.554.500.000	537.721.000.000

Grafik Realisasi Investasi Hingga Tahun 2019 (Kumulatif) Berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp Juta)



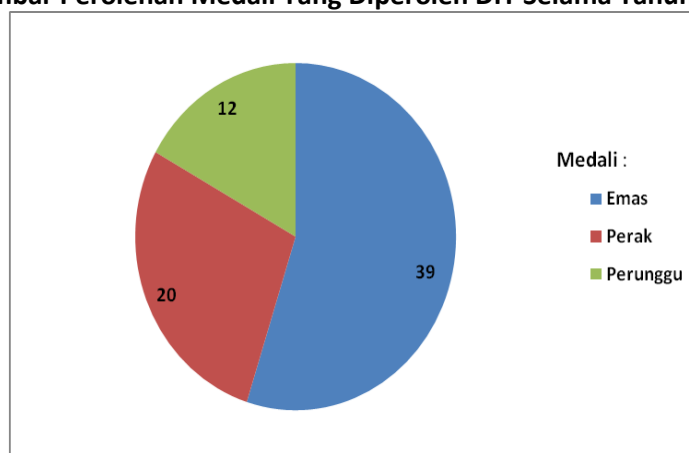
Sumber: DPPM DIY, 2020

20. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Di bidang keolahragaan, pencapaian prestasi olahraga pelajar DIY masih menjadi fokus utama Pemerintah Daerah DIY. Guna mendukung pencapaian prestasi ini diselenggarakan seleksi, pembinaan terhadap calon atlet serta calon pelatih atlet, dan penyempurnaan fasilitas-fasilitas olahraga agar lebih memadai. Pembinaan keolahragaan yang dilakukan di DIY pada tahun 2019 antara lain persiapan pengiriman kontingen ke penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), Pembinaan Atlet Berbakat (PAB), serta penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA). Penyelenggaraan POPDA dimaksudkan sebagai saringan guna menghadapi POPWIL tahun 2021.

Pada indikator capaian prestasi olahraga, DIY berhasil meraih peringkat 7 dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) yang digelar di Jakarta tanggal 16 s.d. 25 November 2019. Pada tahun 2019, DIY mengikutsertakan 122 atlet dari 13 cabang olahraga. Dalam ajang ini, kontingen DIY berhasil meraih 17 medali yang terdiri dari 8 medali emas (dari cabang taekwon do, atletik, panahan, voli pasir), 4 perak (dari cabang taekwon do, pencak silat, dan panahan), serta 5 perunggu (dari cabang tarung derajat, taekwon do, pencak silat, dan panahan). Secara keseluruhan jumlah medali yang diperoleh DIY selama tahun 2019 dari berbagai kompetisi nasional maupun internasional adalah sebanyak 71 buah dengan rincian 39 emas, 20 perak, dan 12 perunggu.

Gambar Perolehan Medali Yang Diperoleh DIY Selama Tahun 2019



21. Urusan Statistik

Dalam upaya mewujudkan satu basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, lengkap dan terintegrasi, untuk menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan, perlu melakukan koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data baik instansi vertikal di daerah, OPD Pemda DIY, kabupaten/kota, dan stakeholders penyedia data lainnya. Hal tersebut harus diimbangi dengan pengembangan instrumen yang memadai sebagai sarana bagi pengumpulan dan penyajian data yang akurat dan terpercaya. Dalam menyelenggaraan urusan statistik Pemda DIY telah melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Statistik Terpadu (Statistic Integrated Information System) yang merupakan instrumen pengelolaan data sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Data Pembangunan Daerah, dan telah dilakukannya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY tentang satu data pembangunan daerah.
- b. Mendorong pemanfaatan data dan informasi yang lebih optimal oleh OPD di DIY, Instansi Vertikal di DIY dan Kabupaten/Kota dengan meng-update Aplikasi Dataku yang lebih user friendly, dan menambah fitur-fitur yang memudahkan dalam pengelolaan data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah, misalnya penambahan fitur SDGs dan lainnya dalam aplikasi Dataku. Selain itu, BPPSD juga melakukan upaya promosi dalam berbagai kesempatan untuk mempublikasikan data dan aplikasi Dataku.
- c. Mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Geospasial dalam aplikasi Geoportal DIY yang didahului dengan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah DIY dengan Badan Informasi Geospasial RI, dalam pengelolaan data geospasial, serta telah dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan PemKab/Kota se DIY tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial melalui Simpul Jaringan Informasi Geospasial.

22. Urusan Persandian

Pelaksanaan urusan persandian di Pemda DIY meliputi:

- a. Counter Surveillance (pengamanan ruangan) ruang kerja dan ruang rapat di lingkungan Pemda DIY.
- b. Signal Jamming (pengacakan sinyal) pada pelaksanaan event tertentu di Pemda DIY dan di Kabupaten / Kota se-DIY
- c. Fasilitasi peralatan persandian untuk mendukung kegiatan pimpinan (HT dan laptop berenkripsi).
- d. Fasilitasi layanan encrypted email atau surel terenkripsi bagi pimpinan, baik enkripsi surel yang akan dikirim maupun dekripsi surel yang diterima untuk diteruskan kepada pimpinan.
- e. Pengelolaan telepon berbasis Voip untuk instansi di lingkungan Pemda DIY
- f. Pengelolaan Frekuensi UHF untuk penunjang komunikasi di lingkungan Pemda DIY
- g. Fasilitasi Pengecekan spectrum peralatan sandi milik provinsi dan Kabupaten/Kota

23. Urusan Perpustakaan

Target Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2019 ini ditetapkan sebesar 24%. Realisasi hingga tahun 2019, terdapat 793.695 pemustaka yang mengakses layanan perpustakaan. Sementara itu, jumlah penduduk berusia produktif (dalam hal ini berusia 5-65 tahun) di DIY pada tahun 2019 menurut data proyeksi dari BPS adalah terdapat sebanyak 3.196.500 jiwa. Sehingga berdasarkan formulasi meta indikator, persentase peningkatan jumlah pemustaka ke

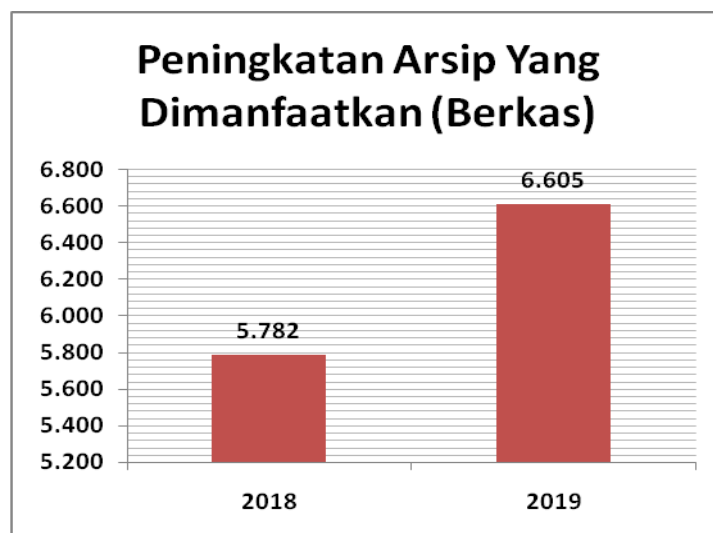
perpustakaan pada tahun 2019 didapat dengan membagi jumlah pemustaka pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk berusia produktif pada tahun n (2019) dikali 100%, angka yang diperoleh adalah 24,83%.

Faktor yang mendorong dan mendukung capaian kinerja tahun 2019 salah satunya adalah publikasi yang dilaksanakan secara terus menerus melalui pameran, liputan media massa seperti radio maupun media elektronik, Billboard, dan juga social media sehingga target kinerja tahun 2019 dapat terealisasi. Di samping itu juga terdapat Layanan Perpustakaan Keliling yang dilaksanakan seminggu sekali di 10 lokasi yang tersebar di kabupaten/kota. Layanan Pojok Baca di 10 titik lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat yaitu: RSUP Dr. Sardjito, RS. YAP, RS. Bethesda, RS. PKU. Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Gamping, RSUD Kota Yogyakarta, SAMSAT Yogyakarta, SAMSAT Kulon Progo, Pengadilan Negeri Yogyakarta, BPJS Kesehatan, dan Kantor Pajak Pratama.

Layanan perpustakaan pada Balai Layanan Perpustakaan salah satunya ada di Gedung Ghratama Pustaka (GTP) yang menjadi destinasi rekreatif edukatif bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya yang memberikan berbagai layanan perpustakaan seperti Layanan Koleksi Buku Anak, Layanan Koleksi Buku Braile, Layanan Koleksi Umum, Layanan Referensi Umum, Layanan Koleksi Digital, Layanan Koleksi Buku Langka, Layanan Koleksi Deposit dan. Di Unit Jogja Library Center (JLC), disediakan Jenis layanan Yogyakarta, Majalah dan Surat Kabar, *Kyoto Corner*, Internet, Audio Visual dan *Center of Excelent (CoE)* Budaya Jawa. Rumah Belajar Modern (RBM) Sewon selain menyediakan buku juga menyediakan kegiatan interaktif yaitu Perpustakaan Kanak-Kanak, Mendongeng, Wisata Pustaka, Internet, Permainan Edukatif, dan Peningkatan Kreatifitas.

24. Urusan Kearsipan

**Gambar Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Tahun 2018-2019**



Sumber: DPAD DIY, 2019 (Diolah)

Jumlah arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2019 sebesar 6.605 berkas dari target yang dicanangkan pada tahun 2019 sebesar 6.300 berkas. Faktor yang mendorong capaian kinerja tahun 2019 ini adalah mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat/lembag dalam menyerahkan arsipnya ke DPAD DIY

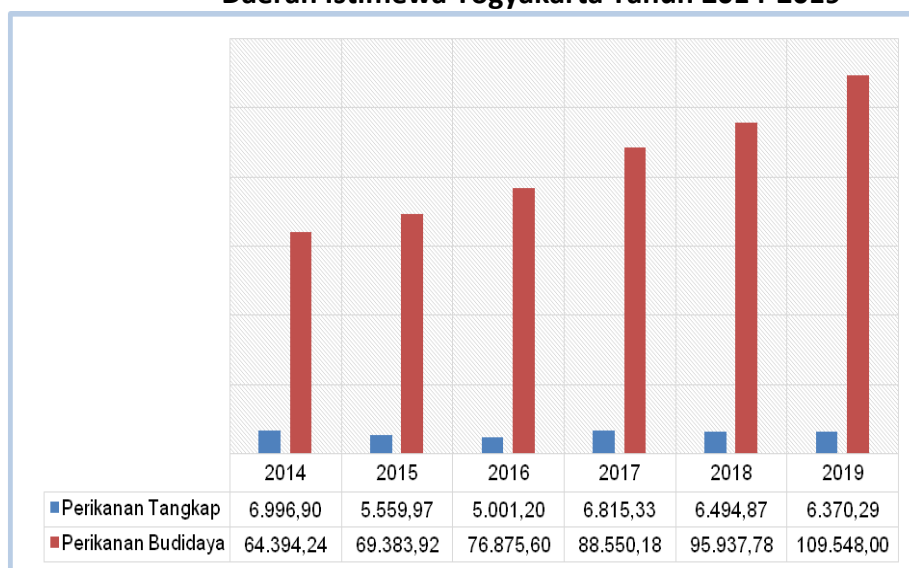
selaku LKD Provinsi sehingga target kinerjatahun 2019 dapat dicapai dengan baik. Hal ini didukung oleh sosialisasi yang terus digalakkan melalui kegiatan promosi dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan melalui pameran arsip. Faktor yang mendorong capaian kinerja tahun 2019 ini adalah adanya publikasi, promosi, dan sosialisasi yang dilaksanakan melalui Pameran arsip, penerapan SIKS dan juga adanya Gerakan Masyarakat Sadar Arsip sehingga target kinerja tahun 2019 dapat dicapai dengan baik.

Pameran arsip pada tahun 2019 dilaksanakan 2 (dua) kali dengan tema yang berbeda. Pameran pertama bertema “Daulat Rakyat Yogyakarta, Cermin Demokrasi Indonesia Melalui Penyelenggaraan Pemilu di Yogyakarta” yang dilaksanakan pada tanggal 18-24 Juli 2019 bertempat di Sasono Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan Yogyakarta. Pameran kedua bertema “Sri Sultan Hamengku Buwono I: Menghadang Gelombang, Menantang Zaman” yang dilaksanakan pada tanggal 1-9 November 2019 bertempat di Bale Angun-angun Sitinggil, Kraton Yogyakarta.

25. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Produksi perikanan DIY, baik budidaya maupun tangkap cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Produksi perikanan budidaya yang mendominasi hasil perikanan di DIY bahkan selama 5 tahun, seperti yang ditunjukkan dalam gambar dibawah ini:

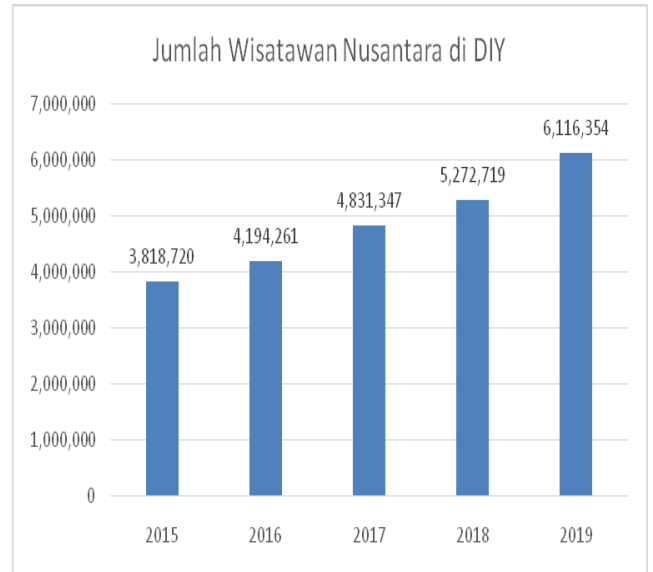
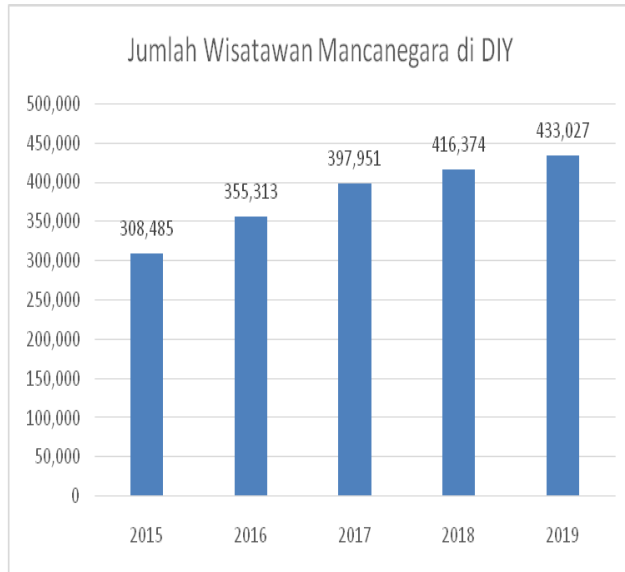
Gambar 1. Grafik Produksi Perikanan Budidaya Dan Perikanan Tangkap di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2019

Sesuai dengan RPJMD 2017-2022 pada tahun 2019 kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan secara umum mengalami peningkatan. Dari indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat bahwa Kenaikan produksi perikanan budidaya dari tahun 2018 ke tahun 2019 adalah 12,44%, sedangkan perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar - 1,96% dikarenakan faktor cuaca yang kurang mendukung dan perijinan kapal yang sulit.

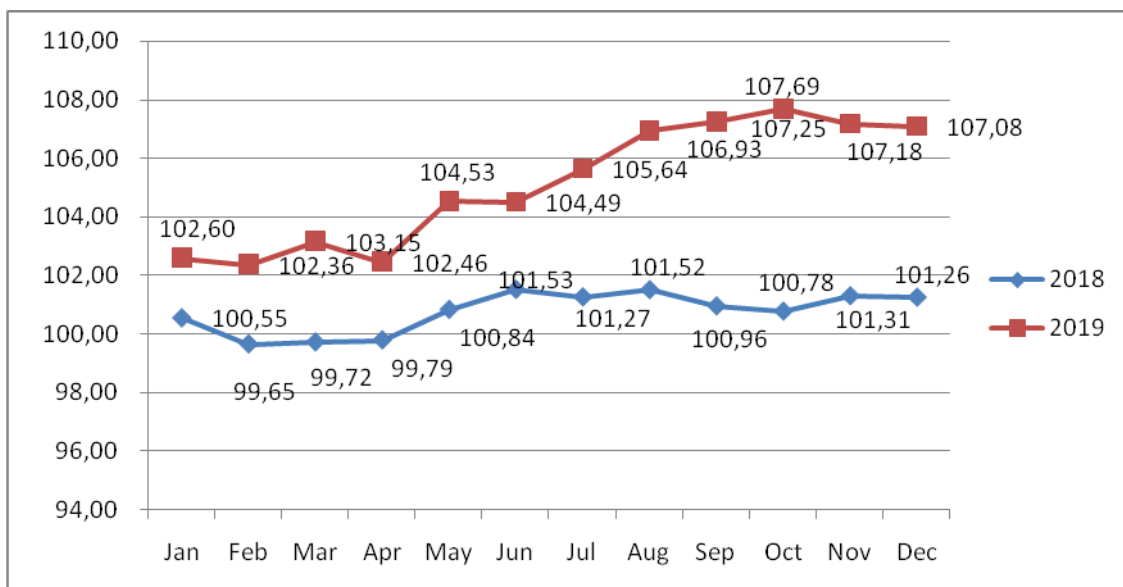
26. Urusan Pariwisata



27. Urusan Pertanian

Nilai NTP tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, dimana NTP tiap bulan pada tahun 2019 lebih tinggi dibanding nilai NTP pada periode bulan yang sama di tahun 2018. Nilai NTP > 100 berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya sehingga pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Nilai NTP yang semakin tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan petani yang semakin tinggi.

Gambar Nilai Tukar Petani Tahun 2018 dan 2019



Sumber: BPS DIY, 2020

28. Urusan Kehutanan

Tabel Luas Hutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019

Kabupaten	Hutan Negara(Ha)	Hutan Rakyat (Ha)	Total Hutan (Ha)	% Total Hutan
Gunungkidul	15.001,15	44.110,87	59.112,02	60,61
Bantul	1.035,18	8.595,00	9.630,18	9,87
Sleman	2.051,13	4.898,80	6.949,93	7,13
KulonProgo	1.046,49	20.795,60	21.842,09	22,39
Daerah Istimewa Yogyakarta	19.133,95	78.400,27	97.534,22	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

Luas hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 adalah 97.534,22 ha yang terdiri dari hutan negara seluas 19.133,95 ha dan hutan rakyat seluas 78.400,27 ha. Dibandingkan dengan luas wilayahnya, luas hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencapai 30,61% sehingga secara teoritis luas hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih mampu memberikan daya dukung terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Jenis vegetasi dominan adalah jati, kayu putih dan pinus yang berpotensi untuk menghasilkan produksi kayu dan non kayu.

Pertumbuhan ekonomi dari sub sektor kehutanan masih didominasi oleh hasil hutan kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan maupun dari hutan rakyat. Produksi kayu bulat pada tahun 2019 di DIY mencapai 154.210,56 m³. Produksi kayu dari dalam Kawasan berhasil menyumbangkan PAD sebesar Rp. 997.595.888,-. Sub sektor kehutanan di DIY juga berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata melalui jasa lingkungan wisata alam. Jasa lingkungan wisata alam terus berkembang seiring dengan meningkatnya tren wisata alam di DIY. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan yang berasal dari jasa lingkungan wisata alam Mangunan, Klayar dan Ngingrong sebesar Rp. 2.454.374.875,- jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 2.260.603.250,-. Selain dari hasil hutan kayu pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan juga didukung oleh hasil hutan bukan kayu, yaitu produksi minyak kayu putih. Produksi minyak kayu putih pada tahun 2019 adalah sebesar 39.323 liter. Jumlah produksi minyak kayu putih di DIY mulai tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel Produksi Minyak Kayu Putih Tahun 2015 - 2019

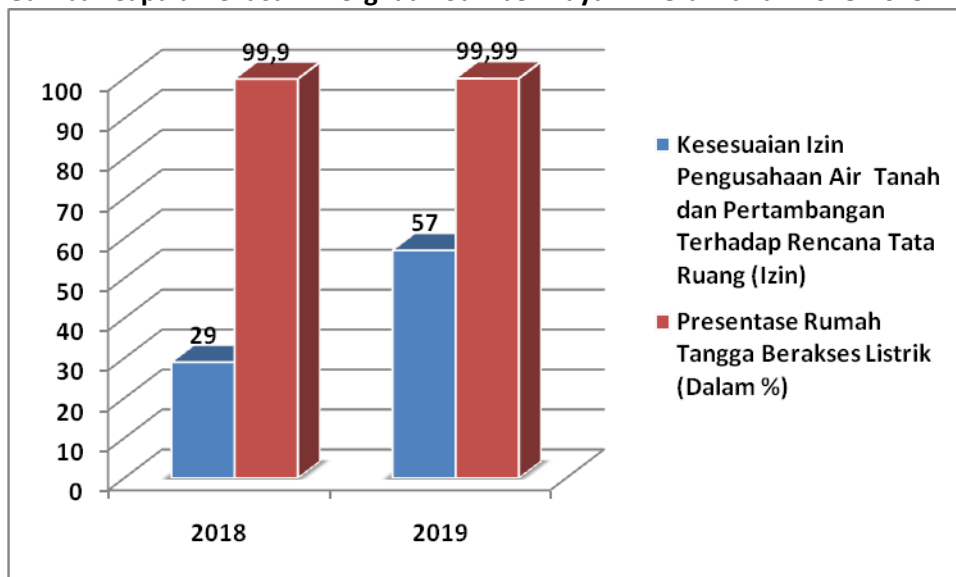
Tahun	Target Produksi (liter)	Realisasi Produksi (liter)	PAD (Rp)
2015	43.785	43.825	8.374.957.500
2016	43.785	31.247	5.311.990.000
2017	44.285	44.297	8.420.859.700
2018	44.285	44.296	10.458.285.600
2019	39.316	39.323	9.889.734.500

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sesuai dengan RPJMD DIY Tahun 2017 - 2022, sasaran Urusan ESDM adalah Meningkatnya Rumah Tangga berakses listrik dan meningkatnya Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan terhadap rencana tata ruang dengan 2 indikator sebagai berikut:

Gambar Capaian Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018-2019



Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2019 (Diolah)

Indikator prosentase rumah tangga berakses listrik diwujudkan melalui penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik. Sampai dengan tahun 2018, presentase rumah tangga berakses listrik sebesar 99,90% atau sejumlah 1.202.119 rumah tangga. Pada tahun 2019, dilakukan penambahan rumah tangga berlistrik sebesar 0,09% atau sejumlah 1.083 rumah tangga. Sehingga capaian prosentase rumah tangga berakses listrik pada akhir 2019 sebesar 99,99% atau 104,59% dari target tahun 2019.

30. Urusan Perdagangan

Pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri ditunjukkan dengan peningkatan nilai ekspor. Selama lima tahun terakhir, perdagangan luar negeri DIY menunjukkan trend positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor dari tahun ketahun dengan rata-rata peningkatan sebesar 11,28%. Nilai Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 tercatat USD 370,22 Juta. Jumlah tersebut meningkat sebesar 9,53% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Pakaian Jadi Tekstil, Mebel Kayu, Sarung Tangan Kulit (STK), Biji Vanila, Minyak Atsiri, STK Sintetis, Papan Kemasan, Wigs (Rambut Palsu), Kerajinan Kertas, dan Kerajinan Kayu adalah komoditas utama ekspor DIY yang di ekspor ke negara-negara tujuan ekspor terutama Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Belanda, Korea Selatan, Inggris, Australia, Perancis, China dan Belgia. Perkembangan ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta telah tertuang dan dapat dicermati pada tabel berikut:

**Tabel Perkembangan Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2014-2019**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Volume (Juta kg)	57,51	56,90	57,01	59,24	53,57	64,17
Nilai (Juta US \$)	233,25	242,47	252,18	296,61	338,02	370,22
Komoditas	166	110	88	78	88	94
Negara	114	115	112	112	115	113
Ekspertir	310	325	286	314	360	400

Sumber: Disperindag DIY, 2019

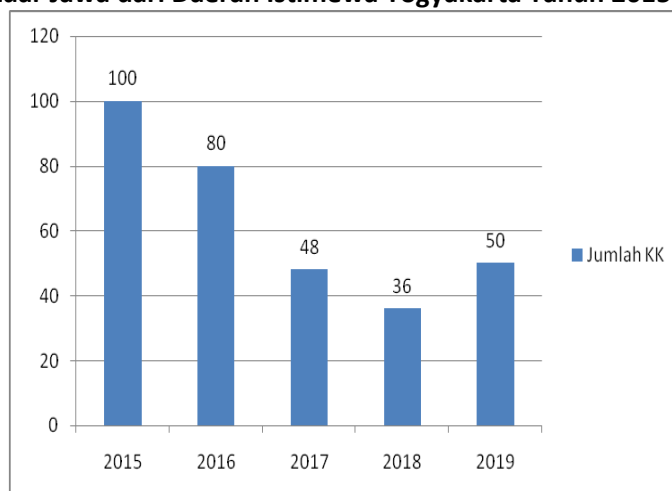
31. Urusan Perindustrian

Sector industry pengolahan memberikan kinerja yang positif pada tahun 2019. Hal ini ditandai dengan terlampauinya target indicator kinerjanya, yaitu nilai sektor industri dalam PDRB dengan capaian sebesar 100,45%. Target indicator nilai sektor industri dalam PDRB pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 13.143.131 Juta dengan realisasi sebesar Rp. 13.201.887 Juta. Peningkatan permintaan atas produk IKM DIY akibat maraknya bisnis online, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan peningkatan permintaan dari negara-negara tujuan ekspor memicu peningkatan kinerja sector industry. Pelaksanaan program penumbuhan dan pengembangan IKM baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan stakeholder lainnya juga memicu peningkatan kinerja sector industri. Penumbuhan dan pengembangan IKM dari pemerintah pusat dilakukan melalui Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

32. Urusan Transmigrasi

Program transmigrasi masih banyak diminati masyarakat sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dikembangkan model transmigrasi yang lebih modern, disamping menyediakan lahan juga perlu dikembangkan produk/komoditas unggulan dan pasarnya untuk menjamin kelangsungan usaha para transmigran. Pelaksanaan transmigrasi juga untuk percepatan pembangunan kawasan terluar dari Indonesia, guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah pemberangkatan transmigran keluar Pulau Jawa selama lima tahun terakhir.

**Grafik Pemberangkatan Transmigran
Ke Luar Jawa dari Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2019**



Sumber: Disnakertrans DIY, 2019 (Diolah)

Seperti pada tabel di atas terlihat pengiriman transmigran sampai tahun 2018 mengalami penurunan dan di tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan alokasi program transmigrasi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sehingga DIY sebagai daerah asal hanya menerima jumlah alokasi yang diberikan Pemerintah Pusat dan pemberangkatan transmigran melalui Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP). Pemda DIY selama kurun waktu 2015-2019 telah memberangkatkan transmigran sebanyak 314 KK dan pada tahun 2019 memberangkatkan sebanyak 50 KK ke 3 lokasi yaitu:

- a) Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 33 KK;
- b) Kabupaten Konawe Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 10 KK;
- c) Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 7 KK;

33. Urusan Kebudayaan

Kebijakan Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan kebudayaan diwujudkan melalui kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa/kelurahan, dan Masyarakat. Urusan kebudayaan ditetapkan tidak sekedar menangani aspek seni saja, melainkan mencakup nilai dan perilaku manusia berserta produk yang dihasilkannya dalam perspektif keistimewaan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya melalui beberapa program.

Program-program kegiatan inovatif yang dapat menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan kebudayaan misalnya: Desa Mandiri Budaya (Desa Wisata, Desa Budaya, Desa Preneur, Desa Prima), Jaga Warga, Festival Kebudayaan Yogyakarta, Gelar Budaya Yogyakarta, Jogja Kota Batik, Wayang Durasi Singkat Museum Sonobudoyo, Diplomasi Budaya, Sekolah Basis Budaya, Anugerah Budaya, Event iconic kabupaten/kota dan lain sebagainya. Selain itu, diselenggarakan pula serangkaian kegiatan Semarak Legenda Suku-Suku Nusantara (Selendang Sutra) sebagai media komunikasi Ikatan Keluarga Mahasiswa dan Pelajar seluruh Indonesia yang sedang menempuh pendidikan diDIY.



Gambar Upacara Adat Lutukan Sunan Geseng

D. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

1. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

- a. Pada tahun 2019, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan hasil pemeriksaan tersebut meliputi LHP atas Laporan Keuangan Nomor 16A/LHP/XVIII.YOG/05/2019, LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 16B/LHP/XVIII.YOG/05/2019 dan LHP atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Nomor 16C/LHP/XVIII.YOG/05/2019. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk kesembilan kalinya.
- b. Perbaikan terhadap akuntabilitas DIY secara nyata telah menghasilkan peningkatan efisiensi melalui perumusan sasaran yang lebih berorientasi hasil, *refocusing* program kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan, dan upaya *crosscutting* program kegiatan. Nilai AKIP DIY pada tahun 2019 diperoleh dari Penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sebesar 90,19 dengan predikat "AA". Pemda DIY merupakan satu-satunya Pemda yang memperoleh Predikat AA yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian AKIP. Sebelumnya, Pemda DIY empat tahun berturut-turut (2014-2017) menyandang predikat A dan mulai tahun 2018 telah mendapatkan predikat AA. Dengan perolehan predikat AA, maka nilai AKIP dalam RPJMD 2018-2022 telah terlampaui. Capaian kinerja AKIP tahun 2019 tersebut didorong oleh keberhasilan Pemda DIY dalam melakukan penyusunan kelembagaan berbasis kinerja (*performance based organization*).

2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan

Tabel Capaian Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan, 2018-2019

Indikator	Satuan	Capaian 2018	2019			Target 2022	Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase capaian Program Urusan Keistimewaan	%	100	73,91	96,15	130,09	91,30	105,31

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2019

Keistimewaan dalam kewenangan kelembagaan ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD DIY dalam membentuk kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keistimewaan dalam kewenangan urusan kelembagaan diantaranya meliputi perumusan kebijakan hubungan kerja perangkat daerah dengan pemerintahan, penyusunan kajian naskah akademis di kabupaten/kota tentang kelembagaan kecamatan dan desa, upaya peningkatan budaya kerja pemerintahan (SATRIYA) dan penataan kelembagaan yang diarahkan pada

kesesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Perdas Nomor. 1 tahun 2013 yang telah diubah dengan Perdas Nomor. 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Daerah.

Hubungan kerja perangkat daerah dengan pemerintah dimaksud, bertujuan mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan antarlembaga guna meningkatkan optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan keistimewaan. Sementara itu dalam penguatan bidang SDM aparatur Pemerintah Daerah DIY dan kabupaten/kota dilakukan dengan sosialisasi dan internalisasi budaya pemerintahan SATRIYA (Pergub DIY No. 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan SATRIYA) serta diklat keistimewaan bagi aparatur. Sosialisasi dan internalisasi dimaksud bertujuan agar nilai-nilai yang terkandung dalam budaya pemerintahan SATRIYA menjadi pedoman, acuan, pola pikir, sikap, dan perilaku aparatur baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Diklat budaya juga diselenggarakan bagi para aparatur agar ASN DIY dapat menerapkan tata nilai budaya Yogyakarta.

Pada tahun 2019 dilakukan penyesuaian nomenklatur dengan nilai-nilai keistimewaan yaitu antara lain: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana), dan Kecamatan (Kapanewon/Kemantren). Penguatan Regulasi terkait penataan kelembagaan asli daerah melalui penetapan Pergub No 25 tahun 2019 yang menjadi dasar nama kecamatan di kabupaten berubah menjadi kapanewon, dan di kota berubah menjadi kemantren. Camat di kabupaten menjadi panewu dan di kota menjadi mantri pamong praja. Kemudian desa di kabupaten berubah menjadi kalurahan, dengan kepala kalurahan disebut lurah. Sementara untuk kelurahan di kota tidak mengalami perubahan nomenklatur baik di kelembagaan maupun jabatannya. Sejauh ini baru Kabupaten Kulon Progo yang melaksanakan perubahan nomenklatur dengan melantik ulang 87 kepala desa dan penjabat kepala desa menjadi lurah dan penjabat lurah. Kegiatan urusan kelembagaan ini didukung keberhasilan kegiatan perencanaan dan pengendalian keistimewaan, fasilitasi Paramparapraja, penyebarluasan informasi, pengelolaan SDM pengampu keistimewaan dan lain lain.

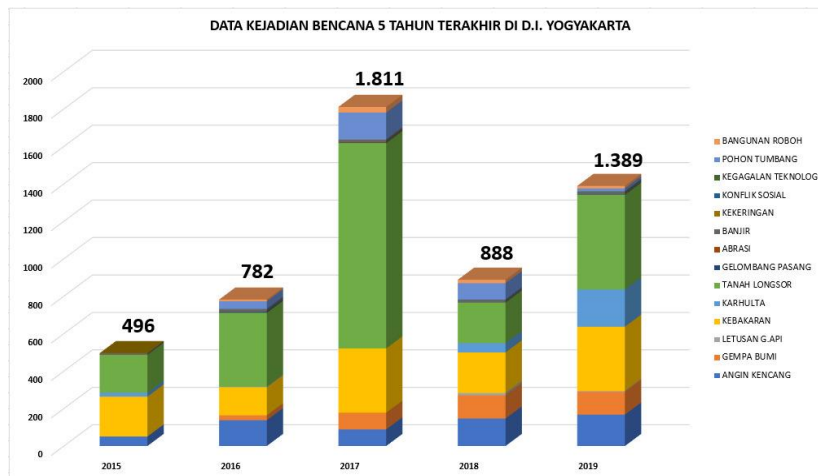
D. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama dengan Pihak ketiga

Pada tahun 2019 telah melakukan 14 (empat belas) Kesepakatan Bersama/ Perjanjian Kerja Sama antar daerah dan 9 (sembilan) Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga. Kerjasama antar daerah yang dilaksanakan tersebut yaitu antara Gubernur DIY dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur DIY dengan Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY dengan Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman, Bupati Bantul, Bupati Gunungkidul, Bupati Kulon Progo, dan Direktur PT. Bank BPD DIY. Kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu dengan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, KADIN DIY, UGM, UPN "Veteran" Yogyakarta, ITY, STIE YKPN Yogyakarta, Politeknik API Yogyakarta, PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Solusi Transportasi Indonesia.

2. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

**Gambar Trend Bencana di Daerah istimewa Yogyakarta
Tahun 2015-2019**



Langkah-langkah prioritas BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meminimalisir risiko dengan meningkatkan ketahanan daerah adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana melalui Destana/Katana dan Sekolah Siaga Bencana (SSB)/ Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB);
2. Penguatan sistem peringatan dini baik yang berbasis masyarakat maupun teknologi pada wilayah rawan bencana melalui pembangunan dan pengembangan EWS/ Sistem Peringatan Dini terintegrasi;
3. Penguatan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan melalui pengembangan pemanfaatan TI;
4. Menyusun kajian-kajian kebencanaan untuk pengurangan risiko;
5. Memberdayakan forum/jaringan/kemitraan antar-lembaga untuk pengurangan risiko bencana terutama melalui FPRB dan klaster-klaster PB;
6. Pemulihan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dan aman (*build back better and safer*) berbasis pengurangan risiko bencana.

3. Penyelenggaraan Tramtibum

Konflik sosial bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian perseteruan antar umat beragama, antar suku antar etnis, sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, provinsi, sengketa sumber daya alam antar masyarakat dengan pengusaha, distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat, sehingga potensi konflik sosial yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta harus diantisipasi sedini mungkin. Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini. Pemda DIY bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, forum-forum kemitraan dan pihak kepolisian memaksimalkan program pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, dan lembaga organisasi yang lain di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga pencegahan konflik sosial dapat diatasi bersama-sama.

E. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Tabel Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019

NO.	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	LEBIH/KURANG	(%)
1	Pendapatan	5.713.924.265.502,71	5.699.328.932.440,50	(14.595.333.062,21)	99,74
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2.015.621.583.744,71	2.082.767.034.434,50	67.145.450.689,79	103,33
1.2	Dana Perimbangan	2.467.472.059.005,00	2.385.702.912.253,00	(81.769.146.752,00)	96,69
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.230.830.622.753,00	1.230.858.985.753,00	28.363.000,00	100,00
	JUMLAH	5.713.924.265.502,71	5.699.328.932.440,50	(14.595.333.062,21)	99,74
2	BELANJA	5.978.131.574.404,65	5.544.876.462.030,02	(433.255.112.374,63)	92,75
2.1	Belanja Tidak Langsung	3.167.243.978.527,01	3.032.231.305.746,71	(135.012.672.780,30)	95,74
2.2	Belanja Langsung	2.810.887.595.877,64	2.512.645.156.283,31	(298.242.439.594,33)	89,39
	JUMLAH	5.978.131.574.404,65	5.544.876.462.030,02	(433.255.112.374,63)	92,75
	SURPLUS/(DEFISIT)	(264.207.308.901,94)	154.452.470.410,48	418.659.779.312,42	(58,46)
3	PEMBIAYAAN	264.207.308.901,94	265.861.156.884,94	1.653.847.983,00	100,63
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	472.804.308.901,94	474.458.156.884,94	1.653.847.983,00	100,35
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	208.597.000.000,00	208.597.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	264.207.308.901,94	265.861.156.884,94	1.653.847.983,00	100,63
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	420.313.627.295,42	420.313.627.295,42	0,00

F. INOVASI DAERAH

Sepanjang tahun 2019 telah banyak diperoleh 102 penghargaan/penilaian secara nasional berkaitan dengan capaian tata kelola pemerintahan, antara lain:

- 1) Pemerintah Daerah DIY ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai lokus pilot project untuk percepatan pelaksanaan Peraturan Pemerintah 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.
- 2) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat penghargaan sebagai Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
- 3) Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri menempatkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada predikat 'Sangat Inovatif' dengan indeks 11.460.
- 4) Terdapat 2 (dua) inovasi pelayanan publik Pemerintah Daerah DIY yang berhasil masuk TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2019 tentang TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yaitu :

- Menggapai Mimpi Sahabat RIMBA Kolaborasi Pemerintah dengan Masyarakat dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam - Balai KPH Yogyakarta;
- SEPATU JOLIFA (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) – Balai Layanan Perpustakaan DIY.

Kedua inovasi pelayanan publik tersebut terpilih oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik internasional, United Nations Public Service Awards (UNPSA) Tahun 2020.

- 5) Terdapat 1 (satu) inovasi pelayanan publik Pemerintah Daerah DIY yang berhasil masuk TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 78 Tahun 2019 tentang TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yaitu SEPATU JOLIFA (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) – Balai Layanan Perpustakaan DIY.


Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY tahun 2019 kami sampaikan dengan harapan akan memperoleh tanggapan serta masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Kami menyadari masih terdapat program dan kegiatan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif senantiasa kami harapkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa program yang telah mencapai hasil optimal merupakan kerja keras semua pihak, baik dari jajaran pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan masyarakat. Untuk itu Pemda DIY memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi dan dukungannya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakatuh.

Yogyakarta, April 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten Signature]

HAMENGKU BUWONO X